

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat untuk lebih baik, melalui langkah pencapaian pertumbuhan masyarakat yang lebih baik, tentunya dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari dukungan stabilitas dan keamanan yang tinggi pula demi tercapainya kondisi masyarakat yang sejahtera adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam menghasilkan dan merealisasikan kebijakan sesuai permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam prosesnya, sebuah kebijakan baik berupa program maupun kegiatan seringkali mengalami distorsi-distorsi di dalam prosesnya, sehingga kebijakan tersebut memberikan dampak kegagalan suatu kebijakan publik dalam pengimplementasian program dan kebijakan, atas dasar tersebut maka diperlukan sebuah evaluasi kebijakan publik yang lahir dari serangkaian input, proses dan output.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu permasalahan kebijakan yang perlu mendapatkan evaluasi kebijakan dalam menangani dan memberikan solusi terhadap permasalahan publik adalah Program Tuka-Tuku Purbalingga sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga. Program yang dibuat pada masa kepemimpinan Bupati Tasdi ini sudah ada sejak bulan Januari tahun 2017, hal tersebut mengimplementasikan misi Bupati Tasdi yang ke-5 yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan melalui simpul-simpul ekonomi, industri manufaktur, pengembangan pariwisata, pertanian dan komoditas lainnya untuk menciptakan Purbalingga yang pro investasi.

Pada tahun 2019, program Bela Beli Purbalingga secara lebih lanjut dikembangkan menjadi program Tuka-Tuku Purbalingga sebagai perwujudan dari identitas produk UMKM Purbalingga yang mempunyai kekuatan merek jika dibandingkan dengan produk-produk UMKM di daerah lain. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Tuka Tuku Produk Purbalingga. Dalam program Tuka Tuku Purbalingga, para pelaku UMKM diberi fasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan pendampingan, pelatihan pengembangan usaha, bantuan

pemasaran produk yang diberikan agar tercipta pelaku usaha yang naik kelas dan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pada kegiatan usahanya.

Program Tuka-Tuku Purbalingga ini dianggap menjadi sebuah program pemerintah yang pro kepada masyarakat kecil dan khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga karena dianggap mampu memberikan peningkatan sektor perekonomian masyarakat, dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM. Melalui program ini pemerintah daerah mewajibkan penggunaan terhadap produk-produk UMKM dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh seluruh organisasi Perangkat Daerah, mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan Hingga tingkat Desa.

Program Tuka-Tuku Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati No.71 Tahun 2019. Di dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 telah di jelaskan tujuan dibentuknya program tersebut bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya yang potensial untuk dikembangkan dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Purbalingga yang diwujudkan dengan membela dan membeli produk Purbalingga. Tuka-Tuku Purbalingga merupakan aktifitas pemasaran produk Purbalingga yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan pelaku usaha baik yang dilakukan secara Daring (*online*) atau Luring (*offline*) sesuai Peraturan Bupati No.71 tahun 2019.

Gambar 1. 1 Tuka-Tuku Purbalingga



Sumber: Dinkop UKM Purbalingga

Menurut salah satu ahli Rujito, UMKM merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan banyak pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi jumlah usaha yang terbentuk maupun dari sisi jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta. Di Indonesia UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi, karena UMKM sendiri memiliki peran penting dan strategis serta memiliki posisi yang dominan di perekonomian nasional, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan (Sudati Nur Sarfiah dkk, 2019).

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di

Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi dan upaya pemerintahan dalam memberantas angka kemiskinan maka pemerintah daerah Purbalingga memfokuskan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi, melalui salah satunya menggiatkan program Tuka-Tuku Purbalingga. Berbagai usaha telah dilakukan seperti melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, pemasaran produk, dan berbagai dokumen perizinan. Selain itu, Dalam pemasarannya produk UMKM melalui Program Tuka Tuku Purbalingga dilakukan secara *online* dan *offline*. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menjalin kerjasama dengan platform Bukalapak, Alfamart, Indomart untuk meningkatkan penjualan.

Dalam keberjalanannya selama 5 tahun terakhir ini terdapat beberapa masalah yang menjadi bahan evaluasi Dinkop UKM Purbalingga kedepannya terhadap kebijakan Tuka-Tuku Purbalingga ini. Masalah yang pertama terjadinya bias UMKM yang sudah mapan, Mitra Tuka-Tuku Purbalingga didominasi oleh sektor makanan, akan tetapi masih sangat banyak pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Tercatat sebelumnya, UMKM makanan atau kuliner yang memiliki nomor NIB di Kabupaten Purbalingga baru 2.437 usaha. Sedangkan, menurut data terbaru 2022 jumlah mitra binaan atau UMKM yang tergabung dalam paguyuban tercatat di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga sebanyak 5.510 usaha. Dari sekian banyak UMKM makanan dan kuliner, sampai saat ini hanya 72 UMKM yang sudah lolos kurasi dengan kriteria sudah mempunyai NIB dan PIRT,

kemasan modern, produk unggulan, dan mempunyai sertifikasi halal (Dokumen Wawancara 28 Oktober 2022). Dari data tersebut masih banyak UMKM yang belum tergabung ke dalam kebijakan karena tidak lolos kurasi yang seharusnya kebijakan ini diharapkan menyasar juga kepada seluruh pelaku UMKM. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi program kurang mampu mempengaruhi para pelaku usaha di Purbalingga secara luas. Apabila seluruh UMKM yang ada di Purbalingga bisa terlibat ke dalam Tuka-Tuku Purbalingga, maka akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang cukup signifikan.

Gambar 1. 2 Pemerintah Kab. Purbalingga bekerjasama dengan Alfamart dan Indomart



Sumber: Dinkop UKM Purbalingga

Permasalahan selanjutnya adalah bias anggota Tuka-Tuku Purbalingga yang terbatas menunjukkan bahwasanya anggota yang tergabung hanya berpusat di pusat kota saja tanpa memperhatikan para pelaku UMKM yang ada di pelosok desa. Jumlah anggota Tuka-Tuku yang tidak mencapai angka lebih dari 100, hal tersebut menunjukkan kalau pelaku UMKM yang sudah mapan akan semakin maju dan pelaku UMKM yang masih tertinggal akan semakin tertinggal. Motivasi

pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Purbalingga untuk diajak berkembang masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan salah satunya yaitu masih terdapat pelaku UMKM yang belum tergabung pada program Tuka Tuku dengan berbagai alasan seperti tidak cukup modal, dokumen perizinan belum lengkap, gaptek terhadap teknologi dan masih menganggap bahwa tergabung dan tidaknya mereka ke dalam program tersebut tak berpengaruh terhadap omset mereka (Dokumen Wawancara 28 Oktober 2022).

Bias informasi yang tertutup juga merupakan masalah yang terjadi dalam keberjalanannya sejauh ini para pelaku usaha UMKM kesulitan mendapatkan akses informasi dari Dinkop UKM Purbalingga. Banyak pelaku UMKM yang masih banyak gaptek terhadap teknologi. Masalah ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mencari solusi bagaimana caranya informasi bisa sampai ke seluruh pelaku UMKM yang ada di Purbalingga khususnya dalam mengurus dokumen perizinan.

Berdasarkan latar permasalahan dan urgensi program Tuka-Tuku Purbalingga terhadap para pelaku UMKM yang ada di Purbalingga, maka penelitian ini berusaha mengkaji lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan Untuk melihat program ini telah berjalan sesuai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan yaitu dapat memberi fasilitas bagi pelaku usaha di Purbalingga dalam mengembangkan usaha yang naik kelas, memasarkan produk, serta mewujudkan masyarakat yang mencintai produk lokal supaya masyarakat mau membela dan membeli produk-produk UMKM khas Purbalingga. Sehingga kebijakan Program Tuka-Tuku Purbalingga dapat dirasakan manfaatnya bagi para pelaku UMKM dan sejalan dengan tujuan dibentuknya program ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana Program Tuka-Tuku Purbalingga ini telah berhasil atau gagal?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berawal dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis seberapa jauh Program Tuka-Tuku Purbalingga ini telah berhasil atau gagal diterapkan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari program Tuka-Tuku Purbalingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan selanjutnya, apakah layak dilanjutkan atau tidak.

2. Manfaat Praktis

A. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam

menentukan kebijakan agar UMKM di Purbalingga dapat terus berkembang.

B. Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi pihak instansi yang bersangkutan yakni Dinas Koperasi dan UMKM Purbalingga.

C. Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi para pelaku UMKM untuk terus berbenah dan berkembang agar produknya dapat bersaing di pasar global.

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai UMKM. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya perlu adanya evaluasi kebijakan guna memastikan apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai harapan dan tujuan, dan membantu peneliti untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1.5.1 Taufik Ourrahman (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Banda Aceh

Pada penelitian ini dijabarkan bahwa pada tahapan penyaluran BPUM kepada pelaku usaha UMKM di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh masih

belum efektif, terutama terkait dengan pengusulan calon penerima dengan tidak memperhatikan pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tersebut. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran program penyaluran BPUM ini dapat berkembang sangat baik pada pelaku usaha di masa pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Ourrahman memiliki persamaan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, yaitu Efektifitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah berupa objek yang diteliti yaitu kebijakan yang di evaluasi oleh peneliti berbeda. Penelitian ini memiliki teori yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian BPUM bagi pelaku UMKM sangat baik dan membantu bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Hanya saja efektivitas dalam penyalurannya masih belum begitu baik karena beberapa faktor. Selanjutnya, ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPUM bagi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi pemerintah terkait, yaitu: Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta monitoring dan evaluasi terkait penerima BPUM; kurangnya anggaran; serta kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu: kualitas sumber daya manusia; kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat; serta kurangnya akses

masyarakat. Korelasinya dengan penelitian ini bahwa setiap program atau kebijakan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1.5.2 Budi Lenora, (2008). Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) “Garda Emas” (Studi kasus UMKM Penghasil Sandal Di Kecamatan Bogor Selatan)

Penelitian ini memberikan gambaran tentang keberjalanan program pemberdayaan usaha mikro dan menengah (UMKM) “Garda Emas” dimana kota Bogor menjadi salah satu kota yang dikenal oleh Masyarakat karena sandal. Pada penelitian ini juga membahas faktor penghambat seperti terbatasnya modal dan sulitnya menjual produk yang telah di hasilkan. Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 20 Juni 1999 telah mengeluarkan program Garda Emas (Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dengan harapan dapat membantu permasalahan dan lebih dapat memberdayakan UMKM.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Budi Lenora adalah dalam pembahasan penelitian ini membahas kesulitan dan menjual produk dan modal dan akhirnya dibuatlah suatu kebijakan supaya lebih dapat memberdayakan UMKM. Memiliki kesamaan bahwa tidak semua UMKM penhasil sandal tergabung ke dalam “Garda Emas”.

Perbedaan dari penelitian ini adalah metode analisisnya menggunakan deskriptif dan tabulasi silang dan menggunakan analisis linear berganda dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM penghasil sandal tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah program “Garda Emas” masih belum efektif dalam memberdayakan UMKM penghasil sendal yang sudah mengikuti program ditinjau dari penerimaan dan pendapatannya. Korelasi dengan penelitian ini adalah bahwa program Tuka-Tuku Purbalingga adalah salah satu kebijakan yang muncul dalam Upaya memberdayakan UMKM.

1.5.3 Yenchilia Tresna Damanik, Aufarul Marom. (2022). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Penelitian ini menjelaskan tentang Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 4 tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan berupa pelatihan keterampilan di salah satu kelurahan yaitu Mangunharjo. Kelurahan Mangunharjo menjadi salah satu kelurahan dengan jumlah warga miskin mengalami penurunan setelah adanya program pelatihan.

Persamaan pada kajian ini yaitu menggunakan metode dan memiliki teori evaluasi kebijakan yang sama yaitu menurut William N. Dunn dimana terdapat beberapa indikator penilaian yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Perbedaan yang terdapat di dalam kajian ini adalah objek kajian yang dibahas oleh peneliti.

Hasil dari kajian ini dilihat dari indikator yang sudah dijelaskan menurut William N Dunn. Korelasi dari penelitian ini dengan Tuka-Tuku Purbalingga yaitu apakah kebijakan tersebut layak dilanjutkan atau tidak, dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang mengkaji tentang sebuah evaluasi berupa program atau sebuah kebijakan. Fokus kajian dalam penelitian ini mengenai evaluasi kebijakan “Tuka-Tuku Purbalingga” sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga. Namun, penelitian ini tidak hanya mengkaji evaluasi dampak kebijakan yang sifatnya umum. *Missing Link* dalam penelitian-penelitian sebelumnya yaitu tidak adanya suatu pernyataan atau perspektif kebijakan tersebut layak dilanjutkan atau tidak sehingga kajiannya tidak memiliki fokus khusus. Sehingga, Penelitian ini akan mengisi bagian kekosongan tersebut.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Pemberdayaan

Mahidin (2006), mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Konsep pemberdayaan yang dilakukan bertujuan pada pemberdayaan bidang ekonomi dan bidang sosial, dengan maksud kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil dan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya

kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional (Rukminto, 2008).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Prinsip dan tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha, Mikro, kecil dan menengah.
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pada Bab II pasal 5 UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektivitas program, serta menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan kelanjutan atau perluasan program. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, evaluasi perlu dilakukan terhadap sistem yang telah berjalan untuk mengetahui aspek positif yang mendorong penggunaan sistem dan mengidentifikasi faktor yang menimbulkan hambatan. Evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (outcome) kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut daftar terdapat empat indikator menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kebijakan yaitu : 1. indikator input, 2. indikator process, 3. indikator outputs dan 4. indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 1. Indikator input, masukan memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya. 2. Indikator process, proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. 3. Indikator outputs, memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. 4. Indikator outcomes, dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. William N. Dunn berpendapat bahwa Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasional teknis, selalu diukur dari unit produk atau pelayanan atau nilai moneterinya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana

organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Menurut Dunn (2014:324) dalam mengukur efektivitas dapat diukur dengan menguji antara tujuan dengan perda apakah sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan pada saat di lapangan.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Menurut Dunn (2014:324) dalam mengukur efisiensi bisa melalui cara keterkaitan antara biaya dan anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah apakah lebih besar atau lebih kecil daripada hasil dari kebijakat tersebut.

3. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, dari pengertian tersebut kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh yang ada dan dapat

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang dilaksanakan dengan sasaran yang dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar. Menurut Dunn (2014:324) dalam mengukur kecukupan dapat dilihat dari tingkat adanya ketersediaan kualitas Sumberdaya Manusia dan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang di fasilitasi oleh pemerintah.

4. Perataan/Kesetaraan

Kesetaraan dalam kebijakan berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Menurut Dunn (2014:324) dalam mengukur Perataan dapat dilihat dari keadilan pada saat penerapan kebijakan di lapangan terhadap para pelaku UMKM, apakah mereka semua telah merasa adil dengan perlakuan pemerintah.

5. Responsivitas

Daya tanggap atau responsivitas dalam kebijakan alternatif dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan alternatif atas penerapan suatu kebijakan. Daya tanggap berkaitan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Menurut Dunn (2014:324) pada

Responsivitas dapat dilihat dari respon dari seluruh lapisan Masyarakat yang menjadi target kebijakan apakah menerima kebijakan tersebut dilaksanakan atau tidak.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek pelaku UMKM sebagai sasaran kebijakan tersebut. Menurut Dunn (2014:324) pada bagian Ketepatan dapat diukur melalui bagaimana respon Masyarakat dan para pelaku UMKM terhadap kebijakan tersebut, hal tersebut dapat memberi kesimpulan apakah kebijakan tersebut sudah tepat dilaksanakan atau belum.

1.7 Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep adalah suatu proses yang bertujuan untuk menurunkan konsep penelitian agar menjadi variabel yang terukur dan dapat lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, variabel yang hendak diteliti adalah

1.7.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan sangatlah penting untuk integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan yang penting, sesuai amanat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah peran serta potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, agar dapat meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan dapat meningkatkan pendapatan rakyat, adanya lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan.

1.7.2 Evaluasi Kebijakan menurut “William n Dunn”

Evaluasi merupakan sebuah tindakan mengamati dan melakukan investigasi efektivitas program, dan menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan untuk perbaikan kelanjutan atau perluasan program. mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

A. EFEKTIVITAS

Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan Tuka-Tuku Purbalingga yang bertujuan untuk membuat masyarakat membela dan membeli produk Purbalingga melalui bantuan fasilitas promosi dan pemasaran. Dalam mengukur efektivitas menggunakan indikator 1) Fasilitas bantuan pemasaran, 2) Ketepatan sasaran program 3) Pertumbuhan jumlah anggota Tuka Tuku.

B. EFISIENSI

Efisiensi adalah keterkaitan antara jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Dalam mengukur efisiensi menggunakan indikator 1) Sumber daya input, 2) Biaya pengeluaran, 3) Keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pelaksanaan Tuka Tuku Purbalingga.

C. KECUKUPAN

Kecukupan merupakan keterkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam mengukur kecukupan menggunakan indikator 1) Kualitas sumber daya manusia yang mengelola untuk mengatasi permasalahan yang ada, 2) Sarana dan prasarana yang diberikan kepada anggota Tuka Tuku.

D. PERATAAN

Kesetaraan dalam kebijakan berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Dalam mengukur Perataan menggunakan indikator 1) Perkembangan jumlah anggota tergabung Tuka Tuku, 2) Distribusi manfaat program kepada sasaran program.

E. RESPONSIVITAS

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Dalam mengukur Responsivitas menggunakan indikator 1) Tanggapan pelaku usaha mengenai Program Tuka-Tuku Purbalingga, 2) Tanggapan masyarakat Purbalingga terhadap Program Tuka Tuku Purbalingga.

F. KETEPATAN

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam mengukur Ketepatan menggunakan indikator 1) Perubahan yang terjadi dari sebelum dan sesudah pelaku usaha tergabung ke dalam Tuka Tuku Purbalingga.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara fundamental menggantungkan data terhadap manusia dan lingkungannya melalui pengamatan (Moleong, 2007: 4). Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang bersifat spesifik dan mendalam supaya memperoleh suatu penjelasan ilmiah dibalik suatu peristiwa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif merupakan data yang lebih mengarah pada kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Studi Kasus (Case Study), studi kasus merupakan desain penelitian dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mempertahankan nilai-nilai holistik dan makna dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata seperti siklus kehidupan seseorang, proses-proses organisasional dan manajerial, perubahan lingkungan sosial, hubungan-hubungan internasional dan kematangan industri-industri (Yin, 2002: 4). Studi kasus menjadi sebuah desain yang cocok untuk penelitian kali ini, karena mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menjadi kekurangan pada kebijakan tersebut dan mengetahui bagaimana langkah yang tepat untuk mengatasi faktor tersebut.

Studi kasus dianggap sebagai sebuah strategi yang lebih cocok dalam penelitian sosial dengan pokok pertanyaan dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan “*how*” dan “*why*” (Yin, 2002: 1). Sejalan dengan pokok permasalahan yang di teliti oleh peneliti yaitu ingin melakukan evaluasi kebijakan

terhadap Program Tuka-Tuku Purbalingga. Menggunakan desain penelitian studi kasus, data yang diperoleh merupakan data yang mendalam dan kaya informasi-informasi dalam mendukung evaluasi kebijakan Program Tuka-Tuku Purbalingga.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Fokus pada penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan Program Tuka-Tuku Purbalingga sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga. Dalam mencapai hal tersebut perlu analisis juga dimulai dari perencanaan dan implementasi kebijakan apakah sudah sesuai dengan tujuan program ini dibuat. Objek pada penelitian kali ini adalah menggunakan UMKM yang sudah dan belum tergabung di dalam Program Tuka-Tuku Purbalingga sebanyak 2 pelaku UMKM yang sudah menjadi menjadi anggota Tuka-Tuku dan 2 pelaku UMKM bukan anggota Tuka-Tuku, serta 3 konsumen pembeli produk Tuka-Tuku Purbalingga. Digunakannya teknik purposive dalam penelitian dimana penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu maka akan didapat informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti (Sugiyono, 2010).

1.8.3 Sumber Data

Sedangkan untuk sumber data dalam penelitian ini adalah subyek penelitian data menempel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Data Primer:

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui pengumpulan data secara langsung dengan wawancara. Adapun data primer didapat dari wawancara kepada informan penelitian yang meliputi :

Tabel 1. 1 Tabel Narasumber Penelitian

NO	Narasumber	Jumlah
1.	Kepala Bidang UMKM Kabupaten Purbalingga	1 Orang
2.	Koordinator Tuka-Tuku Purbalingga	1 Orang
3.	Admin Tuka-Tuku Purbalingga	1 Orang
4.	Anggota Tuka-Tuku Purbalingga	2 Orang
5.	Bukan Anggota Tuka-Tuku Purbalingga	2 Orang
6.	Pengguna Tuka-Tuku Purbalingga	3 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti

Data sekunder:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pelengkap untuk melengkapi data primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, buku, jurnal, skripsi/tesis, foto, dan data observasi lapangan selama penelitian.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang terdiri dari dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan (Moloeng, 2007: 186). Penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara mendalam (indepth interview) dan wawancara terstruktur (structured interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan maksud agar peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai apakah kebijakan tersebut sudah berhasil dan sesuai dengan parameter keberhasilan. Sedangkan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang telah ditentukan daftar pertanyaan yang diajukan serta alternatifnya pun telah dipersiapkan. Wawancara terstruktur memerlukan beberapa alat bantu seperti *tape recorder* agar pelaksanaan wawancara menjadi lebih lancar.

Observasi

Dalam rangka mendukung data dan informasi yang diperoleh saat wawancara, observasi perlu dilakukan untuk mendukung serta melengkapi data yang diperoleh dalam penelitian. Peneliti menggunakan observasi langsung untuk mengumpulkan data pendukung, observasi langsung dilakukan dengan kegiatan formal dan informal. Observasi langsung dalam kegiatan formal meliputi

pertemuan-pertemuan serta kegiatan lapangan (Yin, 2002: 113). Sedangkan dalam kegiatan informal, observasi langsung dilakukan pada kesempatan saat pengumpulan data lain yaitu pada saat wawancara.

Dokumentasi

Hasil penelitian dapat lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan kejadian yang telah berlalu. Dokumen yang diperoleh merupakan dokumen tertulis seperti dokumen milik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga. Kemudian, dokumen berupa foto kegiatan-kegiatan UMKM Purbalingga pada baru-baru ini.

1.8.5 Analisis Data Teknik

Setelah data penelitian terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data pada bagian sebelumnya, lalu diteruskan ke bagian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif dengan desain studi kasus tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan membutuhkan strategi dalam proses analisis dan interpretasinya.

Strategi yang dipakai oleh peneliti yaitu Strategi Proposisi Teoritis, strategi yang mendasarkan pada proposisi teori sebagai dasar orientasi analisis, dengan begitu analisis data benar-benar terfokus pada data tertentu dan mengabaikan data lain yang tidak termasuk ke dalam preposisi teori yang dipakai (Yin, 2002: 136). Analisis yang dihasilkan mencerminkan serangkaian pertanyaan

yang diajukan, tinjauan pustaka serta pemahaman-pemahaman baru. Setelah menentukan strategi yang dipakai dalam penelitian, selanjutnya terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi guna melaksanakan analisis dan interpretasi data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh meliputi :

Pertama, mengolah dan mempersiapkan data mentah untuk dianalisis. Proses ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan ke dalam jenis-jenis yang berbeda.

Kedua, membaca keseluruhan data. Pada proses ini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membangun general sense atas informasi yang diperoleh kemudian merefleksikan makna informasi secara keseluruhan (Creswell, 2013: 276).

Ketiga, pengumpulan kategori. Pengumpulan kategori merupakan tahap dalam proses analisis dan interpretasi data yang di dalamnya akan dilakukan kategorisasi-kategorisasi terhadap data deskriptif yang telah terkumpul. Kategorisasi ini didasarkan pada penggunaan strategi preposisi teori sehingga kategorisasinya berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini (Yin, 2002). Pada langkah ini memerlukan proses coding agar kategorisasi benar-benar sesuai dengan preposisi teori yang digunakan.

Keempat, menunjukkan kategorisasi-kategorisasi yang telah terkumpul dalam suatu bentuk laporan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penyampaian hasil analisisnya (Creswell, 2013: 283).

Kualitas data digunakan untuk mengukur keaslian, keakuratan dan keabsahan data yang telah diperoleh. Metode yang digunakan untuk mengukur hal

tersebut yaitu metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi digunakan untuk memeriksa data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data dari berbagai sumber.

Penelitian ini menggunakan jenis Triangulasi Sumber Data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber data berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif sehingga dapat diukur sejauh mana kualitas data yang diperoleh. Dalam hal ini, triangulasi sumber data mencoba mencari perbedaan antara informasi yang diperoleh dengan sumber data yang lain sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan tentang informasi yang telah diperoleh.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Membandingkan jawaban informan saat wawancara dengan data lapangan yang terkumpul dari observasi dan dokumentasi, sehingga peneliti mampu membandingkan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan guna kepentingan analisis dan interpretasi data.